

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, kampus mengalami pergeseran dari ruang gerakan kritis menjadi arena yang lebih pragmatis dan struktural, dengan organisasi kemahasiswaan yang cenderung terjebak dalam kepentingan politik elite. Kondisi ini menciptakan kesenjangan dalam riset dan praktik gerakan mahasiswa, terutama terkait peran kebudayaan sebagai medium aktivisme. Sementara sebagian besar kajian masih terfokus pada organisasi ekstra dan gerakan politik formal, belum banyak penelitian yang mengulas bagaimana seni dan kebudayaan dapat menjadi sarana perlawanan ideologis di ruang kampus. Di sinilah pentingnya menelaah SRD UIN Bandung, yang mengusung kesenian berbasis riset sosial dan kolektivitas, serta memperlihatkan kemiripan nilai dengan prinsip Realisme Sosialis ala Lekra, sebagai bentuk alternatif gerakan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai ideologis Lekra diaktualisasikan dalam praktik SRD, serta bagaimana seni berperan sebagai medium aktivisme kultural di tengah krisis ideologi dalam kehidupan kampus kontemporer (Kurniadi, 2018).

Fenomena ini menunjukkan adanya krisis dalam ruang politik kampus, di mana partisipasi mahasiswa menjadi tumpul dan tak lagi menemukan bentuk ekspresi yang sesuai dengan identitas serta dinamika generasi hari ini (Syahrul, Paskarina & Sumadinata, 2020). Politik kampus cenderung dipahami secara sempit sebagai urusan struktural, prosedural, dan birokratis—yang menyingkirkan dimensi afektif, kreatif, dan kultural dari proses pembentukan kesadaran politik. Mahasiswa pun semakin enggan terlibat dalam ruang-ruang diskusi formal yang dianggap membosankan dan tidak relevan dengan problematika sosial yang mereka rasakan secara langsung (Bhakti, 2020).

Dalam latar belakang penelitian ini, peneliti merasa perlu menjelaskan realita sosial dalam lingkungan kampus yang terdapat pembagian kelas dalam sistematika ekonomi, yang pada dasarnya berbicara politik kita berbicara soal wacana, tapi ekonomi adalah benang merah dalam simpul realita sosial yang

dimana bibit dari konsep jangka panjang yang menentukan bagaimana realita sosial dapat terbagi menjadi berbagai macam kelas dalam masyarakat kampus. Peneliti membagi tiga macam kelompok kelas yang membuat penelitian ini lebih spesifik dan menajam, yakni dalam konstruk penciptaan kelas ada.

Di sisi lain, perkembangan kebudayaan dan media ekspresi alternatif seperti seni rupa, desain, musik, teater, film, dan media digital menawarkan bentuk keterlibatan sosial-politik mahasiswa yang lebih organik dan membumi. Medium-medium ini tidak hanya berperan sebagai sarana ekspresi artistik, tetapi juga membuka ruang kritik sosial, artikulasi identitas kolektif, serta narasi keberpihakan terhadap isu-isu masyarakat. Kebudayaan, dalam hal ini, memiliki daya hidup sebagai medium politik alternatif yang mampu menyentuh aspek emosional, simbolik, dan reflektif mahasiswa, berbeda dengan watak kaku dan eksklusif dari politik formal kampus (G. A. A. Widiari Widyaswari & I Gusti Nyoman Widnyana, 2018). Namun demikian, potensi tersebut masih belum diakui secara serius dalam praktik politik mahasiswa. Minimnya fasilitasi, ruang institusional, dan legitimasi terhadap ekspresi budaya menyebabkan banyak gerakan mahasiswa berbasis kebudayaan tidak terorganisir, bersifat sporadis, dan kurang terhubung dengan gerakan sosial-politik yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa kampus belum berhasil menciptakan ekosistem politik yang terbuka dan responsif terhadap bentuk partisipasi politik mahasiswa yang kini lebih cair, lintas medium, dan bersifat afektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembacaan ulang terhadap posisi kebudayaan dalam ruang politik kampus serta penguatan peran mahasiswa sebagai agen perubahan melalui medium-medium alternatif yang lebih relevan dengan konteks kekinian.

Peranan kebudayaan yang mendunia seringkali berafiliasi dengan humanisme rasional ala kapital, keterlibatannya hanya dilangsungkan untuk kepentingan berbagai ideologi yang terselubung pada segelintir orang (Grau, 2020). Namun ada suatu lembaga berbasis sosialis yang mencoba menyalakan obor kebudayaan, sebagai nyala yang menuntun kearah gerakan kebudayaan yang melibatkan kepentingan orang banyak. Lekra yang resmi lahir pada 1950, namun

embrio spirit yang dibawa Lekra sudah lahir sejak 45 (Widariyanti, 2022). Golongan terpelajar pada masa Jepang memiliki 'kulturkammer' dimana Fasis Jepang adalah bentuk sensor pikiran dan menjadi anti tesis kemegahan demokrasi, Lahirnya Lekra merespon itu dengan alternatif politik melalui kebudayaan dan kesenian, ini menjadi sebuah problematika realita sosial yang patut diperiksa ulang bagaimana rujukan alternatif lahir karna perencanaan sistematika politik tidak diyakini akan kuat, dan Lekra menjadi salah satunya yang menyelesaikan itu dengan politik alternatif melalui kebudayaan. Pertanyaannya, apa jadinya keutuhan kemerdekaan tanpa keberadaan Lekra yang membumi di zaman itu? Bagaimana Lekra yang mengambil Langkah saat 1950 pada demokrasi liberal yang begitu kontradiktif terselsaikan tanpa politik alternatif atas kebebasan berpikir yang dibawa oleh Lekra?

Membahas dari pada latar lahirnya spirit Lekra tidak terlepas dari Angkatan 45, tidak tepat dikatakan bahwa Angkatan 45 dari mulai Chairil Anwar dengan karya 'Kenanglah Kamu' yang bernafaskan semangat 45, Pun dengan Sang Paus Sastra Indonesia H.B Jassin menangkis dengan mengatakan ' Tenaga tenaga kata kata yang mengandung pikiran pikiran paling dalam dianggap lebih kurang dari perjuangan dengan senjata. Padahal bahasa hati tidak kurang merasakan arti kemerdekaan '. Peneliti melihat kurang tepat diartikan bahwa kesastraan dianggap sebagai senjata menentang Jepang dan Belanda, Kebudayaan tidak dilakoni dengan tujuan perbaikan nasib rakyat tapi hanya sebatas bentuk praktek mewujudkan isi proklamasi 1945 dan upaya meneruskan perjuangan sususnan rakyat (Supartono & Kebudayaan, 2000). Analisis peneliti melihat dua Sastrawan tersebut mengkonstruk kemewahan demokrasi liberal dengan apik melalui kebudayaan sastra, karna menurut Peneliti, sastra bukan hanya gejala individual tapi juga gejala realitas sosial (Saputra, 2013). Lekra harus menggerakkan dan mendobrak batas kesadaran masyarakat dizaman itu untuk terbebas dari fikiran dan tubuh yang kering dan terjajah.

Melewati Lekra 1950, gerak aktivisme yang dipelopori oleh para seniman telah mewarisi segenap prinsip daya hidup dan apa-apa yang disebut sebagai naluri

komunal. tercermin di dalam sebuah kutipan yang diterbitkan oleh majalah TEMPO berjudul, "Lekra dan Geger 1965"

"Seorang Seniman yang menciptakan karya-karyanya dengan fantasi liar, bebas, tak terbedung, tak terkekang, suka kepada eksperimen pribadi, tak ikut organisasi, dan hanya bertumpu pada humanisme merupakan gelandangan tanpa arah".

Pembacaan terkait penelitian ini, kita akan membahas persoalan yang berkaitan dengan sikap yang dicita-citakan oleh Lekra. Seniman sebagai individu dan seniman sebagai kelompok, keduanya menjadi topik menarik untuk dibahas. Beberapa kritik telah dilancarkan oleh Lekra, salah satunya kepada H.B. Jassin. Dalam tulisan yang diterbitkan oleh Lekra, berjudul "Kepada Seniman Universil". Lekra menggugat ungkapan H.B. Jassin yang terlalu mendorong para seniman untuk hidup terpisah dari kondisi yang terorganisir. Sebagaimana yang terjadi pada peristiwa Tugu, yang diselenggarakan oleh Pudjangga Baru, Lekra mengungkapkan kewajiban sebagai seniman, yakni mempertahankan perdamaian dunia. cita-cita besar seperti ini, sangat tidak memungkinkan untuk dijalankan oleh seorang seniman ketika ia memiliki jalan hidup seorang-seorang.

Persoalan yang melatarbelakangi penelitian ini bahwa realita yang terjadi hari ini kemudian harus dibenahi dengan historikal yang hidup dan menghidupkan, menyoal terkait bagaimana Lekra berhasil menjadi politik alternatif dari 1950-1965, sehingga kemampuan aspirasi tersampaikan dari berbagai sudut media yang terjalin dalam sebuah perjuangan yang bukan hanya dalam skala nasional namun juga internasional. Realita yang terjadi di hari ini menjadi sangat kontradiktif dengan masih adanya minimalitas kreativitas yang menghambat keberhasilan aspirasi selain daripada melalui ruang politik pragmatis yang kering dan jauh dari kebebasan kreativitas tak terbatas. Maka dari itu peneliti merasa perlu diciptakanya ruang baru yang menjadi alternatif sebagai bentuk ruang ekspresi dari aspirasi masyarakat kampus agar supaya semangat menciptakan terbukanya perlawanan pada sikap sikap yang bersifat memunculkan runtuhnya demokrasi di zaman ini.

Dalam tataran kebudayaan, seni (art) memiliki potensi signifikan sebagai medium aktivisme kampus karena kemampuannya dalam mengartikulasikan wacana kritis, ekspresi ideologis, serta dialektika sosial-politik melalui representasi simbolik yang transformatif. Seni tidak semata menjadi ruang estetika, melainkan juga wahana epistemologis yang mampu menjangkau kesadaran kolektif secara afektif dan reflektif, melampaui keterbatasan diskursus akademik yang seringkali eksklusif dan terfragmentasi. Dalam konteks institusi pendidikan tinggi yang cenderung terjebak dalam birokratisasi pengetahuan dan apatisisme politik, seni hadir sebagai instrumen intervensi kultural yang mendestabilisasi narasi dominan serta menumbuhkan habitus kritis di kalangan mahasiswa. Melalui bentuk-bentuk praksis artistik seperti mural, poster, instalasi, performans, dan seni interaktif lainnya, seni rupa mampu merekonstruksi ruang kampus menjadi arena kontestasi makna, solidaritas ideologis, dan artikulasi politik yang bersifat emansipatoris—sebuah gerak kebudayaan yang menandai reaktualisasi peran mahasiswa sebagai subjek historis dalam perubahan sosial.

Sementara kampus dalam taraf konvensional belum cukup membentuk gairah komitmen, di mana pergerakan dibubuhkan melalui sensibilitas dan akal yang hidup—bukan hanya kepekaan yang bisa diperjualbelikan melalui kapital. Dalam konteks ini, kebudayaan dan kesenian masih memiliki keterbatasan sebagai medium pergerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa konvensional kerap terjebak dalam pola-pola formalistik dan simbolik, tanpa menggali secara mendalam potensi transformatif dari ekspresi budaya dan seni. Peneliti membangun komitmen kecil melalui tulisan ini sebagai salah satu bukti bahwa pengetahuan adalah visualisasi pergerakan dalam membangun bangsa. Pengetahuan seharusnya menjadi dasar pijakan bagi setiap gerakan, termasuk dalam mereposisi kebudayaan dan kesenian sebagai instrumen perubahan sosial. Peneliti melihat bahwa organisasi kampus, secara general, mencoba menciptakan culture-nya masing-masing untuk meningkatkan sensibilitas terhadap minimnya pergerakan, yang seharusnya dimulai dari kesadaran akan pentingnya pengetahuan yang matang dan mumpuni, serta penghayatan akan peran budaya dalam menciptakan perubahan.

Dalam kenyataan medan politik kampus, kita dapat melihat arus utama politik dalam segmen mahasiswa yang berada di dalam ormawa atau yang biasa kita sebut dengan organisasi ekstra, adapun di wilayah internal kampus tersendiri yang menjadi sorotan standing position secara politik adalah ruang lingkup dema, sema, hmj, dan struktural internal kampus lainnya (Prayandi Viano & Indrawadi, 2022). Dengan demikian atas ketimpangan dan kepelikan tersebut UKM Seni Rupa dan Desain UIN Bandung hadir untuk menawarkan jalan setapak sepi nan sunyi agar menjadi letupan-letupan kecil di tengah persoalan keringnya atau gagal pahami mahasiswa terhadap urgensi standing position.

Ditengah pergulatan lingkungan budaya politik di kampus SRD UIN Bandung merupakan unit kegiatan mahasiswa seni rupa yang lahir dan menjadikan kesenian sebagai alat reaktualisasi perjuangan sosial dan gerakan kesadaran kolektif. Mereka menolak individualisme dalam berkesenian dan menekankan pentingnya organisasi sebagai wadah pembentukan kesadaran sosial. Prinsip kaderisasi dalam SRD bukan hanya upaya regenerasi struktural, melainkan juga proses ideologis untuk membentuk seniman yang peka terhadap realitas sosial. Dengan berpijak pada riset sebelum berkarya, SRD memastikan bahwa setiap karya yang dihasilkan tidak lepas dari konteks masyarakat, menjadi representasi dari kondisi nyata, bukan hasil imajinasi kosong atau estetika picisan. Hal ini mengakar pada semangat “Realisme Sosialis” dan jejak pemikiran Lekra, yang menjadikan seni sebagai bagian dari perjuangan rakyat.

Lebih jauh, SRD menjadi bentuk reaktualisasi gerakan politik di kampus melalui jalur kebudayaan. Melalui karya seni yang berpihak dan berbasis riset, SRD mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, sensitif terhadap isu sosial, serta terlibat dalam perubahan struktural lewat medium budaya. Dalam iklim kampus yang kerap steril dari diskursus politik yang membumi, SRD menghadirkan seni sebagai ruang dialektika antara ekspresi dan kesadaran. Mereka menghidupkan kembali peran seniman sebagai aktor sosial, bukan hanya kreator visual, dan menjadikan kebudayaan sebagai instrumen alternatif untuk merumuskan serta menggerakkan wacana politik di tengah krisis intelektual dan kekosongan ideologis

dalam kehidupan kemahasiswaan kontemporer. Bukan hanya dalam taraf keseharian, SRD UIN Bandung merecah siklus bagaimana Lekra membangun akademik politik melalui gerakan nya, bukan hanya dalam program tapi SRD juga membangun sense of beauty dalam taraf sensibilitas yang mengakar dalam budaya kritis membaca fenomena sosial.

Hal itu juga terimplikasi dengan bukti-bukti pergerakan jalannya organisasi mahasiswa dilingkungan kampus sebagai wadah arus politik, dari mulai kemurnian pergerakan hingga demonstrasi masa yang ditungguangi selama perkembangan Demokrasi bangsa. Pun SRD terus membangun ruang intelektualitas di wilayah luar maupun dalam kampus, bagaimana culture politik dan jiwa kritikus hingga kini masih ditarik melalui tarian unjuk diri yang dimulai dari siapa yang paling kaya diksi dan jumlah buku yang sudah dibaca.

Penelitian terdahulu mengemukakan melalui salah satu penggalan sajak Rendra, Kebudayaan serupa oase ditengah gurun yang dipenati paceklik kelakuan perpolitikan. "apalah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan" (WS Rendra,). Dari penggalan sajak Rendra, Peneliti meninjau adanya kolaborasi yang cukup epik antara pelafalan kebudayaan dengan gerak politik. Bahwa ruang alternatif untuk suara kepentingan masyarakat tidak selalu berupa ruang medium yang berbasis politik tapi sangat dimungkinkan melalui medium lain yang berupa lembaga kebudayaan (Rehayati, 2012).

Membaca penelitian terdahulu melalui arsip Lekra kepentingan urgensi yang hadir menjadi lebih eksklusif bagaimana seni menjadi alat dialog yang pasti dengan berbagai macam diskursus hari ini. Seni adalah panglima Tunggal dalam politik (Lekra Tak Membakar Buku), kutipan tersebut menambah kekuatan argumentasi bahwa seni adalah alat dialog untuk gerakan politik.

Penelitian ini memposisikan kebudayaan sebagai medium politik alternatif yang mampu merespons kemandekan aktivisme formal di kampus. Alih-alih sekadar ekspresi estetis, kebudayaan dihadirkan sebagai ruang artikulasi ideologis

yang lentur dan kontekstual—membuka kemungkinan baru bagi gerakan mahasiswa yang lebih organik, reflektif, dan berpihak pada realitas sosial.

Masalah inti dalam penelitian ini berangkat dari kegelisahan terhadap minimnya ruang ekspresi ideologis dalam gerakan mahasiswa konvensional di ranah kampus, yang kerap terjebak dalam struktur formal, simbolisme kosong, dan pemisahan antara seni dan politik. Dalam konteks ini, kebudayaan dan kesenian sering kali dianggap sebagai aktivitas pinggiran yang tidak berdaya dalam mendorong perubahan struktural. Padahal, sejarah telah mencatat bagaimana kesenian dapat menjadi kekuatan politik, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) pada masanya—yang menjadikan seni sebagai alat perjuangan rakyat dan pembentukan kesadaran kelas. Penelitian ini melihat bahwa semangat serupa tengah tumbuh dalam SRD UIN Bandung, yang menghidupkan kembali gagasan bahwa seni harus berpihak, berakar pada riset, dan bersentuhan langsung dengan realitas sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai ideologis Lekra—seperti keberpihakan, kolektivitas, dan keberadaan seni sebagai bagian dari praksis sosial—diaktualisasikan dalam praktik kesenian SRD sebagai medium aktivisme kampus. Masalah inti yang ditelaah adalah bagaimana SRD tidak hanya memproduksi karya seni, tetapi juga membangun kesadaran politik melalui jalur kebudayaan, dan sejauh mana pola kaderisasi, riset sebagai basis produksi karya, serta organisasi sebagai ruang ideologis mencerminkan spirit Lekra dalam konteks kekinian. Seni yang dapat menyampaikan sebuah kebenaran realitas yang dipahami secara total. Pemahaman akan realitas secara total hanya dapat terjadi jika seniman mampu memahami gerak dialektika dari realitas dengan melibatkan seluruh kesadaran diri (Karyanto, 1997:69). Dalam iklim kampus yang mengalami kekosongan ideologis dan terdepolitisasi secara kultural, SRD menawarkan satu bentuk reaktualisasi gerakan mahasiswa yang melampaui demonstrasi konvensional, yakni melalui kebudayaan yang hidup, kontekstual, dan berpihak.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik dan nilai-nilai politik kebudayaan yang dijalankan oleh UKM Seni Rupa dan Desain (SRD) UIN Bandung sebagai bentuk revitalisasi spirit LEKRA?
2. Bagaimana relasi antara seni, aktivisme, dan habitus politik yang terbentuk dalam komunitas SRD UIN Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik revitalisasi nilai-nilai LEKRA dalam gerakan seni UKM SRD UIN Bandung.
2. Untuk menganalisis konstruksi habitus politik dan budaya dalam komunitas SRD sebagai bentuk ekspresi politik alternatif.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang dinamika politik alternatif di lingkungan kampus, khususnya melalui kasus SRD UIN Bandung. Dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta menggambarkan berbagai gerakan dan program yang dilakukan, penelitian ini dapat memperkaya teori-teori tentang peran organisasi kemahasiswaan dalam menghadapi arus politik dominan. Temuan ini dapat membantu dalam membangun kerangka konseptual yang lebih komprehensif tentang strategi dan mekanisme yang dapat diterapkan oleh UKM atau organisasi serupa untuk mempertahankan eksistensinya sebagai ruang politik alternatif di tengah dinamika sosial-politik yang kompleks.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan panduan bagi pengambil keputusan di SRD UIN Bandung dan organisasi

serupa dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif. Dengan memahami hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menciptakan komitmen sebagai ruang politik alternatif, serta mengetahui praktik-praktik yang telah berhasil dilakukan, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi dari kegiatan dan program yang mereka lakukan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat peran mereka dalam memberikan dampak positif bagi mahasiswa dan masyarakat kampus secara lebih luas, serta memperkuat identitas dan tujuan organisasi dalam menjalankan misi mereka.

1.5. Kerangka berfikir

Penelitian ini bertumpu pada kerangka teori interdisipliner yang menggabungkan pendekatan sosiologi politik, teori budaya, dan psikologi sosial. Tujuan dari penggunaan kerangka teori ini adalah untuk memahami bagaimana praktik seni di UKM Seni Rupa dan Desain (SRD) UIN Bandung dapat menjadi cermin revitalisasi spirit LEKRA dalam konteks politik alternatif mahasiswa di era kontemporer. Teori utama yang digunakan adalah teori praktik sosial dari Pierre Bourdieu, khususnya konsep habitus, modal simbolik, dan ranah (field). Habitus digunakan untuk melihat bagaimana nilai-nilai seperti kolektivitas, keberpihakan, dan resistensi simbolik terinternalisasi dalam pola pikir dan tindakan anggota SRD. Modal simbolik menjelaskan bagaimana SRD mendapatkan legitimasi dan otoritas di lingkungan kampus bukan melalui struktur formal, melainkan melalui reputasi budaya dan produksi makna. Ranah kampus dipandang sebagai arena kontestasi di mana SRD berhadapan dengan logika dominan politik mahasiswa yang pragmatis dan terinstitusionalisasi.

Selain Bourdieu, kerangka teori ini juga diperkaya oleh gagasan John Holloway mengenai politik alternatif. Holloway berpendapat bahwa perubahan sosial tidak selalu lahir dari pengambilalihan kekuasaan formal, melainkan dari praktik-praktik kecil yang membangun ruang resistensi baru. Pendekatan ini sangat relevan dengan model gerakan SRD yang bersifat kultural, simbolik, dan non-

struktural. Melalui karya seni dan aktivitas kolektif, SRD menciptakan ruang politik yang tidak diatur oleh struktur formal, namun tetap sarat dengan makna ideologis dan kritik sosial. Untuk menjawab rumusan masalah yang bersifat kuantitatif, teori persepsi sosial digunakan. Teori ini menjelaskan bagaimana anggota SRD membangun persepsi mereka terhadap nilai-nilai LEKRA berdasarkan pengalaman individual dan pengaruh kolektif komunitas. Persepsi ini menjadi indikator untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai politik kebudayaan, seperti keberpihakan kepada rakyat dan komitmen terhadap seni sebagai alat perjuangan—telah meresap dalam aktivitas dan pemikiran mereka.

Konsep-konsep pendukung lain yang penting adalah seni sebagai media politik, budaya resistensi, dan aktivisme simbolik. Seni diposisikan tidak hanya sebagai ruang ekspresi, tetapi juga sebagai alat politik yang sah untuk menyuarakan ketimpangan, menyampaikan keberpihakan, dan menciptakan ruang wacana alternatif di tengah kekakuan politik kampus. Dalam kerangka ini, SRD dipahami sebagai subjek politik yang secara sadar menolak depolitisasi budaya dan menciptakan medan politik alternatif melalui estetika.

Penggunaan kerangka teori ini memungkinkan integrasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam analisis. Teori Bourdieu dan Holloway menyediakan fondasi konseptual untuk menganalisis dinamika kualitatif dalam praktik dan nilai SRD, sementara teori persepsi sosial mendukung pendekatan kuantitatif untuk mengukur pandangan anggota SRD terhadap internalisasi spirit LEKRA.